

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Achmad Rubaie, 2007, *Hukum Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum*, Malang: Bayu Media Publishing.
- Agus Dwiyanto, 2011, *Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif*, Yogyakarta: Gadjah Mada Press.
- Amin Ibrahim, 2008, *Teori dan Konsep Pelayanan Publik Serta Implementasinya*, Bandung: Mandar Maju.
- Arba, 2015, *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Bachtiar Effendy, 1993, *Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Pelaksanaannya*, Bandung: Alumni.
- Djoko, Prakoso dan Budiman, Adi Purwanto, 1985, *Eksistensi Prona Sebagai Pelaksanaan Mekanisme Fungsi Agraria*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Handayaniingrat, 1996, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Jakarta: Gunung Agung.
- Harsono, B, 2003, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta: Djambatan.
- Husni Thamrin, 2013, *Hukum Pelayanan Publik*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, 2008, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Yogyakarta: Nuansa.
- Keminfo Indonesia, 2016, *Term of References Focus Group Discussion, Infomasi Publik tentang Dokumentasi Pertanahan*, Jakarta: Komisi Informasi Republik Indonesia.
- Lijan Poltak Sinambela, 2008, *Reformasi Pelayanan Publik*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Marbun, S,F, 2013, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Press.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2007, *Dualisme Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah.

- Murad, R, 1997, *Administrasi Pertanahan: Pelaksanaannya dalam Praktik*, Bandung: Mandar Maju.
- Pamudji S, *Ekologi, Administrasi Negara*, Bina Aksara, Jakarta, 1986
- Parlindungan, A,P, 1993, *Komentar Atas Undang Undang Penataan Ruang (Undang Undang Nomor 24 Tahun 1992)*, Bandung: Mandar Maju.
- Philipus M Hadjon, 1994, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Purwaningdyah, M,W, dan Agus Wahyudi, 2016, *Konsep Dasar Administrasi dan Administrasi Pertanahan*, Modul Pengajaran Administrasi Pertanahan, Yogyakarta: UII Press.
- Soeprapto, R, 1986, *Undang Undang Pokok Agraria dalam Praktik*, Jakarta: UI Press.
- Sumardjono, Maria, S,W, 2001, *Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi dan Implementasi*, Jakarta: Kompas.
- Sunindhia, Y, W dan Ninik, W, 1988, *Pembaruan Hukum Agraria Beberapa Pemikiran*, Jakarta: Bina Aksara.
- Theo Huijbers OSC, 1982, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta: Yayasan Kanisius.
- Urip Santoso, 2009, *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*, Jakarta: Fajar Interpratama Offset.

JURNAL

- Hasanah, Ulfia, 2012, “Status Kepemilikan Tanah Hasil Konversi Hak Barat Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Dihubungkan dengan PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah”, *Jurnal Ilmu Hukum Riau*, Vol. 3, No. 01.
- Martati, Aulia dan Karjoko, Lego, 2018, “ Implementasi Asas Akuntabilitas Dalam Pendaftaran Tanah Secara Sistematis Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 12 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap”, *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, Vol. 4, No. 4.

- Arif Cahyadi, 2016, “Penerapan Good Governance Dalam Pelayanan PUBLIK (Studi Tentang Kualitas Pelayanan Elektronik Kartu Tanda Penduduk Berbasis Good Governance Di Kecamatan Sukolilo Surabaya)”, *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, Vol. 2, No. 2.
- Aty Uar, 2016, “Pengaruh Pelaksanaan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Terhadap Kinerja Pelayanan Publik Pada Badan Pertahanan Nasional (BPN) Kota Ambon”, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 6, No. 6. (1).
- Wemben, Norma, 2010, ”Kinerja Pelayanan Pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gorontalo”, *Jurnal Legalitas*, Vol. 3, No. 2.
- Hadisiswati, Indri, 2014, “Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah”, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 2, No. 1.
- Dewanto, Ahmad R, 2014, “ Pelaksanaan Program Larasita Dalam Penertiban Administrasi Pertanahan”, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 2, No. 2.
- Mudjiono, 2007, “Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Indonesia Melalui Revitalisasi Fungsi Badan Peradilan”, *Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 14.
- Ambarura, Melita N, 2015, “Pelaksanaan Peralihan dan Pendaftaran Peralihan Hak Milik Atas Tanah (Jual Beli Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan Di Kabupaten Toraja Utara”, *Jurnal Fakultas Hukum Atmajaya*”, Vol 4, No. 3.
- Rizkiyanti, Rani, 2019, “Kedudukan Hukum Pemegang Hak Milik Atas Tanah Pertanian yang Melebihi Batas Maksimum”, *Justitia Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 1.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043)

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5038).

Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5280).

Tap MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643).

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696).

Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 351, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5804).

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18).

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 21).

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.

Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 208).

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 112).

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 59).

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria Dan Tata Ruang.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional.

Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksanaan *Landreform*.

Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980 tentang Perincian Tugas dan Tata Kerja Pelaksanaan *Landreform*.

Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 1997 tentang Penertiban Tanah-tanah Obyek Redistribusi *Landreform*.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan Penegasan Tanah Negara Menjadi Obyek Pengaturan Penguasaan Tanah/*Landreform*.

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (Perka BPN) Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan BPN (Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038).

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1127).

Peraturan Meteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelayanan Publik.

Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 63/KEM/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

AKSES INTERNET

Haryanto, Adi. "Pengurusan Sertifikat Tanah Di BPN KBB Lama Warga Keluhkan PTSL". 2019. <https://jabar.sindonews.com/read/9267/1/pengurusan-sertifikat-tanah-di-bpn-kbb-lama-warga-keluhkan-ptsl-1565183338>, diakses tanggal 10 September 2019.

<http://kab-kulonprogo.atrbpn.go.id/Tentang-Kami/Struktur-Organisasi.aspx>, diakses tanggal 25 Oktober 2019.

<https://www.atrbpn.go.id/Standar-Layanan-Administrasi-Pertanahan>, diakses 25 Oktober 2019.

Melani, Agustina. "Jokowi Targetkan BPN Terbitkan 7 Juta Sertifikat Tanah". 2018. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3222344/jokowi-targetkan-bpn-terbitkan-7-juta-sertifikat-tanah-pada-2018>, diakses tanggal 10 September 2019.

Nugraha, Singgih Wahyu. "Partisipasi Program PTSL Rendah Warga Enggan Repot Urus Sertifikat Tanah". 2018. <https://jogja.tribunnews.com/2018/09/09/partisipasi-program-ptsl-rendah-warga-enggan-repot-urus-sertifikat-tanah>, diakses tanggal 22 Oktober 2019

Wibisono, Kunto. “Terlibat Pungli Perangkat Desa Mundur”. 2010.
<https://www.antaraneews.com/berita/218073/terlibat-pungli-perangkat-desa-mundur>, diakses tanggal 27 Oktober 2019.